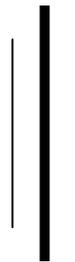




**PEMERINTAH DAERAH
KAB. BARITO KUALA**

JL. P. ANTASARI NO.1. Telp. 0511-4799041 MARABAHAN-KALIMANTAN SELATAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



**SEKRETARIAT DAERAH,
KAB. BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022**

MARABAHAN, MEI 2018

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 188.45/999/SETDA/2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

SEKRETARIAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Sekretaris Daerah No. 188.45/998/SETDA/2018 tentang Penetapan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat ;
5. Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal : **30 Mei 2018**

SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. SUPRNYONO, M.IP
Pembina Utama Madya

NIP. 19590127 198503 1 009

FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yg dievaluasi	Pemerintahan Umum	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah Produk Hukum Daerah yang telah dilaksanakan dibandingkan yang terbit sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah perda yang dijalankan DIBAGI Jumlah perda yang telah diterbitkan pada tahun berjalan X 100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Pemerintahan Umum	Sekretaris Daerah	Bagian Pemerintahan	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
			Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Pemerintahan Umm	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Nilai Evaluasi AKIP Besaran Nilai berdasarkan hasil penilaian Tim KEMENPANRB
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Pemkab	Pemerintahan Umum	Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM SKPD


SEKRETARIS DAERAH
Ir. H. SUPRIYONO, M.IP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590127 198503 1 009

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor 188.45/999/ SETDA /2018
 Tanggal 30 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA					UNIT PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yg dievaluasi	Pemerintahan Umum	Bagian Hukum	100	100	100	100	100	Sekretaris Daerah
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Pemerintahan Umum	Bagian Pemerintahan	Sangat Tinggi (ST)	Sekretaris Daerah				
			Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi	10	11	12	13	15	Sekretaris Daerah
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Pemkab	Pemerintahan Umum	Bagian Organisasi	85	87	89	91	93	Sekretaris Daerah

SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. SUPRIYONO, M.IP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590127 198503 1 009

Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor 188.45/999/SETDA/2018
 Tanggal 30 Mei 2018

FORMULASI INDIKATOR KINERJA (IK) ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA ESELON III	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	Pemerintahan Umum	Kabag Hukum	Bagian Hukum	Menjamin suatu produk hukum daerah tidak bertentangan dengan kaidah penyusunan produk hukum baik material maupun formil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yg sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum (memenuhi kaidah formal dan materiil sebuah produk hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah) DIBAGI jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan pada tahun berjalan X 100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten (LPPD) tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	Kabag Pemerintah	Bagian Pemerintahan	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).	Jumlah item isian yg dapat terisi DIBAGI jumlah kegiatan yg direncanakan untuk dikerjakan sesuai indicator isian laporan X 100%
			Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten (LKIP Kab) tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	Kabag Organisasi	Kabag Organisasi	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media	Jumlah item isian penjelasan capaian IKU Kab. yg dapat terisi DIBAGI jumlah IKU Kab. Yg telah ditetapkan X 100%

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA ESELON III	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
			waktu				pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai berdasarkan hasil penilaian KEMENPANRB	
			Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	Kabag Organisasi	Bagian Organisasi	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Jumlah SKPD dengan nilai LKIP 15 DIBAGI jumlah SKPD yang menyusun LKIP X 100%
			Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten (SAKIP Kab) tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	Kabag Organisasi	Bagian Organisasi	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai berdasarkan hasil penilaian Inspektorat provinsi atau KEMENPANRB
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Persentase SKPD Pelayanan yang memiliki nilai kinerja pelayanan ≥ 80 (dr 42 SKPD/unit kerja)	Pemerintahan Umum	Kabag Organisasi	Bagian Organisasi	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan tepat waktu DIBAGI jumlah SKPD yang melaksanakan survey X 100%

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA ESELON III	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
	berbasis teknologi informatika		Jumlah inovasi kinerja yang mengikuti SINOVIK	Pemerintahan Umum	Kabag Organisasi	Bagian Organisasi	Dengan diikutsertakannya hasil inovasi kinerja pada pemerintah daerah, akan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi dan kreasi dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat	Jumlah inovasi kinerja yang mengikuti SINOVIK setiap tahunnya.
			Presentase pengaduan masyarakat yg tidak lanjut	Pemerintahan Umum	Kabag Humas Protokol	Bagian Humas Protokol	Penerapan system pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis elektornik LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah pendauan masyarakat yg ditindaklanjuti DIBAGI Jumlah laporan pengaduan yang masuk (sesuai syarat dan ketentuan) X 100%



SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SUPRIYONO, M.IP

Pembina Utama Madya

NIP. 19590127 198503 1 009

Lampiran IV Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor 188.45/999/ SETDA /2018
 Tanggal 30 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA (IK) ESELON III

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	IK ESELON III	BIDANG URUSAN	TARGET KINERJA					UNIT PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yg diimplementasikan (Perda)	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Hukum
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten (SAKIP Kab) tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Pemerintah
			Nilai Evaluasi LAKIP Kabupaten (kategori pelaporan)	Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten (LKIP Kab) tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Organisasi
				Persentase Komponen Laporan Kinerja SKPD 'bernilai 15' (dari 47 SKPD)	Pemerintahan Umum	4%	6%	8,5%	10%	15%	Kabag Organisasi
			Nilai SAKIP Kabupaten	Persentase ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten (SAKIP Kab) tepat isi dan waktu	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	IK ESELON III	BIDANG URUSAN	TARGET KINERJA					UNIT PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kabupaten	Persentase SKPD Pelayanan yang memiliki nilai kinerja pelayanan ≥ 80 (dr 42 SKPD/unit kerja)	Pemerintahan Umum	26%	31%	38%	45%	52%	Kabag Organisasi
				Jumlah inovasi kinerja yang mengikuti SINOVIK	Pemerintahan Umum	1	1	1	1	1	Kabag Organisasi
				Persentase pengaduan masyarakat yg ditidak lanjuti	Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Humas Protokol



SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SUPRIYONO, M.IP
Pembina Utama Madya

NIP. 19590127 198503 1 009

Lampiran V Keputusan Sekretaris Daerah
 Nomor 188.45/999/SETDA/2018
 Tanggal 30 Mei 2018

FORMULASI INDIKATOR KINERJA (IK) ESELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA ESELON IV	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Jumlah penanganan perkara/sengketa/masalah masalah hukum yang melibatkan instansi/aparat	Pemerintahan Umum	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Subbag Bantuan Hukum dan HAM	Untuk membantu pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah daerah sebagai objek maupun subjek perkara hukum	Jumlah perkara/sengketa hukum yg ditangani setiap tahunnya
			Jumlah produk hukum daerah diajukkan (RAPERDA)	Pemerintahan Umum	Kasubbag Produk Hukum	Subbag Produk Hukum	Menjamin suatu produk hukum daerah tidak bertentangan dengan kaidah penyusunan produk hukum baik material maupun formil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah	Jumlah draf produk hukum daerah yang diajukan untuk ditetapkan setiap tahunnya
			Jumlah masyarakat (peserta) sosialisasi produk hukum	Pemerintahan Umum	Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	Subbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	Agar produk hukum yg telah diundangkan dapat diketahui dan dipahami masyarakat secara lebih mendalam	Jumlah masyarakat yg mengikuti sosialisasi setiap tahunnya
			Jumlah Laporan evaluasi produk Hukum daerah	Pemerintahan Umum	Kasubbag Produk Hukum	Subbag Produk Hukum	Untuk menjamin suatu produk hukum daerah yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan/diimplementasikan Untuk menjamin suatu produk hukum daerah yg telah ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum di atasnya	Jumlah produk hukum daerah yang dievaluasi, dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis
			Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasikan menjadi sumber arsip.	Pemerintahan Umum	Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	Subbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum	Untuk menjamin ketersediaan dokumen arsip atas produk hukum daerah yang telah ditetapkan. Untuk menkompilasi Yurespudensi hukum atas perkara hukum yang melibatkan pemerintah daerah	Jumlah produk hukum daerah yang diarsipkan setiap tahunnya

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA ESELON IV	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN			
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen LPPD	Pemerintah an Umum	Kasubbag bina OTDA	Subbag bina OTDA	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).	Jumlah dokumen LPPD yang disusun dan disampaikan pertahun tepat waktu selama 5 tahun		
			Jumlah dokumen Lakip Kabupaten	Pemerintah an Umum	Kasubbag akuntabilitas	Subbag akuntabilitas			Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai berdasarkan hasil penilaian KEMENPANRB	Jumlah dokumen LKIP Kabupaten yang disusun dan disampaikan pertahun tepat waktu selama 5 tahun
			Persentase SKPD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	Pemerintah an Umum	Kasubbag akuntabilitas	Subbag akuntabilitas			Jumlah SKPD menyampaikan LKIP tepat waktu DIBAGI Jumlah SKPD wajib menyusun LKIP X 100%	
			Jumlah fasilitasi penyusunan laporan kinerja SKPD (sosialisasi/work shop)	Pemerintah an Umum	Kasubbag akuntabilitas	Subbag akuntabilitas			Jumlah kali fasilitasi yang dilakukan untuk penyusunan LKIP SKPD	
			Jumlah dokumen SAKIP kabupaten yg kompilasi	Pemerintah an Umum	Kasubbag akuntabilitas	Subbag akuntabilitas			Jumlah dokumen SAKIP yang disusun dan disampaikan pertahun tepat waktu selama 5 tahun	
			Jumlah fasilitasi perbaikan SAKIP Kabupaten dan SKPD	Pemerintah an Umum	Kasubbag akuntabilitas	Subbag akuntabilitas			Jumlah kali fasilitasi perbaikan SAKIP Kabupaten dan SKPD dengan Biro Organisasi/Inspektorat Provinsi Kalsel/Kemertrian PANRB	
			Jumlah laporan evaluasi kinerja periodic	Pemerintah an Umum	Kasubbag akuntabilitas	Subbag akuntabilitas			Jumlah kali evaluasi laporan kinerja yang disusun setiap triwulan	

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA ESELON IV	BIDANG URUSAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN	
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA					PENJELASAN ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Jumlah SKPD/instansi yang mengikuti penilaian Kinerja pelayanan publik	Pemerintah an Umum	Kasubbag ketatalaksanaan dan inovasi	Subbag ketatalaksanaan dan inovasi	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah kali sosialisasi
			Jumlah dokumen monev pelayanan publik	Pemerintah an Umum	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi	Subbag Ketatalaksanaan dan Inovasi	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah kali fasilitasi
			Persentase SPKD Pelayanan yang menyampaikan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pemerintah an Umum	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi	Subbag Ketatalaksanaan dan Inovasi	Untuk memenuhi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah SKPD Pelayanan yg menyampaikan hasil SKM DIBAGI jumlah SKPD pelayanan yg wajib menyampaikan SKM X 100%
			Jumlah inovasi kinerja yang dikembangkan dan diterapkan	Pemerintah an Umum	Kasubbag ketatalaksanaan dan inovasi	Subbag ketatalaksanaan dan inovasi	Untuk meningkatkan inovasi kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi kinerja yang dikembangkan
			Persentase pengaduan masyarakat yg diterima dan diverifikasi	Pemerintah an Umum	Kasubbag Komunikasi Pimpinan Daerah	Subbag Komunikasi Pimpinan Daerah	Penerapan system pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis elektornik LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan diverifikasi DIBAGI jumlah seruh pengaduan masyarakat yang masuk X 100%

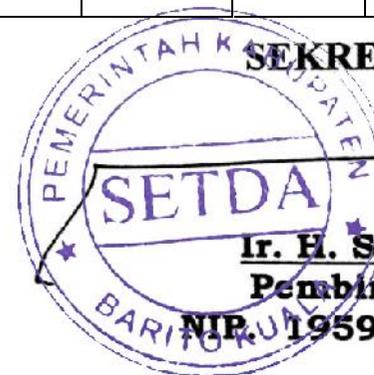


SEKRETARIS DAERAH
Ir. H. SUPRIYONO, M.IP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590127 198503 1 009

INDIKATOR KINERJA (IK) ESELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	IK ESELON III	IK ESELON IV	TARGET KINERJA					UNIT PENANGGUNG JAWAB		
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yg diimplementasikan (Perda)	Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan	Jumlah penanganan perkara/sengketa/masalah masalah hukum yang melibatkan instansi/aparatur	2	2	2	2	2	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM		
					Jumlah produk hukum daerah diajukan (RAPERDA)	10	10	10	10	10	Kasubbag Produk Hukum		
					Jumlah masyarakat (peserta) sosialisasi produk hukum	250	250	250	250	250	Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum		
					Jumlah Laporan evaluasi produk Hukum daerah	1	1	1	1	1	Kasubbag Produk Hukum		
					Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasikan menjadi sumber arsip.	400	400	400	400	400	Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronkan dan berkualitas	Jumlah Dokumen LPPD	1	1	1	1	1	Kasubbag bina OTDA		
					Nilai Evaluasi LAKIP Kabupaten (kategori pelaporan)	Persentase SKPD menyampaikan LKIP tepat waktu dan baik	Jumlah dokumen Lakip Kabupaten	1	1	1	1	1	Kasubbag akuntabilitas
							Persentase SKPD yang menyampaikan LKIP tepat waktu	100	100	100	100	100	Kasubbag Akuntabilitas
							Jumlah fasilitasi penyusunan laporan kinerja SKPD	1	1	1	1	1	Kasubbag Akuntabilitas

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	IK ESELON III	IK ESELON IV	TARGET KINERJA					UNIT PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(sosialisasi/workshop)						
			Nilai SAKIP Kabupaten	Persentase SKPD menyampaikan LKIP tepat waktu dan baik	Jumlah dokumen SAKIP kabupaten yg kompilasi	4	4	4	4	4	Kasubbag akuntabilitas
					Jumlah fasilitasi perbaikan SAKIP Kabupaten dan SKPD	2	2	2	2	2	Kasubbag akuntabilitas
					Jumlah laporan evaluasi kinerja periodic	4	4	4	4	4	Kasubbag akuntabilitas
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kabupaten	Persentase SKPD Pelayanan yang memiliki nilai kinerja pelayanan ≥ 80 (dr 42 SKPD/unit kerja)	Jumlah SKPD/instansi yang mengikuti penilaian Kinerja pelayanan publik	69	69	69	69	69	Kasubbag ketatalaksanaan dan inovasi
					Jumlah dokumen monev pelayanan publik	1	1	1	1	1	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi
					Persentase SPKD Pelayanan yang menyampaikan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	100	100	100	Kasubbag Ketatalaksanaan dan Inovasi
				Jumlah inovasi kinerja yang mengikuti SINOVIK	Jumlah inovasi kinerja yang dikembangkan dan diterapkan	5	5	5	5	5	Kasubbag ketatalaksanaan dan inovasi
				Presentase pengaduan masyarakat yg ditidak lanjuti	Persentase pengaduan masyarakat yg diterima dan diverifikasi	100	100	100	100	100	Kasubbag Komunikasi Pimpinan Daerah



SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. SUPRIYONO, M.IP

Pembina Utama Madya

NIP. 19590127 198503 1 009